



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 171 TAHUN 2023

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun



2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023.

**KESATU :** Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
  - d. Tim Penguatan Tata Laksana;

- e. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- f. Tim Penguatan Pengawasan;
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana aksi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR 171 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
 TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Thomas Dohu	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Drs. Yosafat Koli	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Fransiskus V. Diaz	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Jeffry A. Galla	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Adiwijaya Bakti	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Melanie S. Wila Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2.	Lusia A. D. P. Hekopung	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
3.	Novenda S. Tehusalawanny	Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
4.	Ari Praptiningsih	Pelaksana di Subbagian Perencanaan	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Tati Haryati Binti Husein	Pelaksana di Subbagian Data dan Informasi	Anggota	Provinsi NTT.
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Yosef H. Himan	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT;  b. Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT.
2.	Emerensiana Purnawati	Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
3.	Bollivardo R. Liha	Pelaksana di Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Ahmad Banaji	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	
5	Pedro De Sa	Pelaksana di Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Carolus F. Dengi	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT.
2.	Wiwi D. Unbanunaek	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Anneke A. S. Raga	Pelaksana di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	S. Anedo Pradipta Nugroho	Pelaksana di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Aryans Terra Fanu	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT;
2.	Maria E. Silla	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Yoseph Dopo	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT.
4.	Julio R. Pratama	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Kain Jella	Pelaksana di Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA				
1.	Bathseba S. Dapatalu	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; b. Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT.
2.	Agatha M. S. Woda	Pelaksana di Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Bernadete Ose Bolen	Pelaksana di Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Steven Solukh	Pelaksana di Subbagian Perencanaan	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Peiter G. Nappoe	Kepala Subbagian Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT; b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) <i>Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Angeli L. Lake	Fungsional Analis Hukum Ahli Muda	Anggota	
3.	Siti Samsiah U. Ratu Loly	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	
4.	Hersindy A. Serang	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	
5.	Septy R. Saragih	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Edson Carlos	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT.
2.	Abraham F. Benyamin	Pelaksana di Subbagian Perencanaan	Anggota	
3.	Linda Benyamin	Pelaksana di Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	Tinekowati H. Neno	Pelaksana di Subbagian Keuangan	Anggota	
5.	Siti Zainab	Pelaksana di Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Andrew S. N. Kette	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT.
2.	Agustina J. Touselak	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Brigitha R. De Rozari	Pelaksana di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Elsa D. Tambunan	Pelaksana di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Adiwijaya Bakti	Sekretaris KPU	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan; b. Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; c. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan d. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2	Melanie S. Wila Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian Perencanaan, Program dan Data	
3.	Edson Carlos	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	Lusia A. D. P. Hekopung	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
5.	Bathseba S. Dapatalu	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

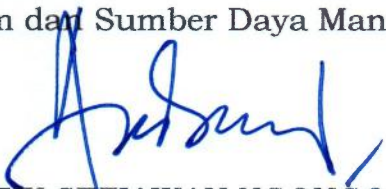
Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 171 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Manajemen Perubahan	1 Perencanaan Reformasi Birokrasi	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Provinsi NTT, terdiri dari: a) Tim Pengarah b) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan) c) Tim Agen Perubahan	SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√										
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√										
			3 <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi NTT	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√										
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media.	1 Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Pembangunan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi NTT di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1 Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	√	√				√						√	
				2 Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN													
			3 Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: a) Penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu; b) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;	1 Penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN	√	√											Target 100%
				2 100 (%) melakukan pelaporan LHKPN	√	√	√										
				3 100 (%) melakukan pelaporan LHKASN	√	√	√										



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			c) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan	4 Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi:		√	√										
			d) Pembangunan Zona Integritas	a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan		√	√										
				b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan		√	√										
				c. Laporan Pelaksanaan Zona Integritas KPU Provinsi NTT						√						√	
			4 Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di KPU Provinsi NTT	1 Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5 Pembangunan instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1 Tersedianya instrumen <i>reward and punishment</i> di lingkungan KPU Provinsi NTT;								√					Pemberian penghargaan pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun
				2 Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Provinsi NTT;						√						√	Survei kepuasan layanan dilaksanakan per semester
		3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.			√			√			√			√	
			2 Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit)	a) Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja			√			√			√			√	
				b) Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE)						√					√	√	
			3 Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja kepada:	a) Tim RB KPU RI menerima pelaporan:												√	
			a) Tim pengarah di lingkungan unit	1) SK Tim RB, TIM Agen Perubahan, dan Assessor;	√	√	√										Tidak ada Assessor pada KPU Provinsi NTT
			b) Tim Reformasi Birokrasi KPU	2) Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√										



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			c) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sample	3) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Terisinya LKE Unit di aplikasi 4) PMPRB Online bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk sebagai sampel	√	√											
				b) Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Ajen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya.													
2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan	1 Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas pengaturan dan penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan unit kerja/satuan kerja	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan Unit Kerja/satuan kerja	Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2 Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas pengaturan dan atau penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan Unit Kerja/satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan naskah Penetapan yang sudah direvisi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada satkeholder	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah direvisi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4 Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau penetapan naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan naskah Penetapan yang sudah disahkan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		5 Pengelolaan JDIH	a) Pembangunan JDIH satuan kerja b) Pengelolaan JDIH satuan Kerja	a) Dapat diaksesnya JDIH satuan Kerja b) Updatenya data JDIH Satuan Kerja		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penguatan Kelembagaan	a) Evaluasi Organisasi	1 FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Provinsi NTT 2 Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	1 Dokumen laporan FGD Evaluasi Organisasi 2 Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI						√						√	
		b) Penyusunan SOTK	1 Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK satuan kerja sesuai mandat 2 Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi satuan kerja	1 SOTK satuan kerja sesuai mandat 2 Struktur Organisasi satuan kerja			√	√									
4	Penguatan Tata Laksana	1) Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Provinsi NTT	1 Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Provinsi NTT	1 Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;	√												



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2 Tersedianya peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;	√												
				3 Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan	√												
				4 Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja	√												
			2 Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Provinsi NTT	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Penyusunan SOP di lingkungan KPU Provinsi NTT	1 Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi ke dalam SOP		√	√	√									
				2 Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP		√	√	√									
				3 SOP sudah dilegalkan; dan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4 Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4 Evaluasi SOP di lingkungan KPU Provinsi NTT	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Provinsi NTT	1 Adanya kebijakan pendukung PPID		√											
			1 Penyampaian Kebijakan/maklumat/Standar pelayanan/SOP PPID di lingkungan satuan kerja	2 Dapat diaksesnya Maklumat layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dapat diakses melalui website dan JDIH KPU Provinsi NTT
			2 Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja	3 Meningkatnya kepuasan layanan PPID		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Pengelolaan PPID dan e-PPID di lingkungan satuan kerja	4 Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindaklanjuti		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4 Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID	5 Jumlah sengketa informasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5 Survei kepuasan pemohon informasi	6 Adanya rekomendasi/pelaksanaan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				7 Indeks kepuasan pemohon informasi						√						√	



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3) Tata Kelola dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Provinsi NTT	1 Tata kelola SPBE di lingkungan KPU Provinsi NTT: a) Pembangunan aplikasi inovatif/transformasi proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplika di unit/ satuan kerja lain  b) Strategi dan perencanaan anggaran dan belanja TIK c) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi d) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai	1 Kebijakan internal tata kelola SPBE													
				2 Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)													
				3 Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4 Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Provinsi NTT													
				5 Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				6 Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan													
			2 Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan:  a) Aplikasi tata naskah dinas  b) Aplikasi Manajemen Kepegawaian  c) Aplikasi Perencanaan  d) Aplikasi penganggaran  e) Aplikasi Keuangan  f) Aplikasi Manajemen Kinerja  g) Aplikasi Pengadaan	1 Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3 Terisinya dan aplikasi Manajemen Perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4 Terisinya data aplikasi Penganggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				5 Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				6 Terisinya aplikasi manajemen kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				7 % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik  a) Layanan pengaduan publik  b) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum  c) Layanan Whistle Blowing System (WBS)  d) Layanan Kepemiluan  e) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja yang selalu diperbaharui	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3 Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan jumlah pelapor/laporan pengaduan													Dilaksanakan oleh KPU RI
				4 Jumlah aplikasi kepemiluan yang dimanfaatkan, serta:  a) data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				b) Indeks Survei kepuasan publik terhadap aplikasi													
				5 Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID satuan kerja oleh publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4 Penerapan sistem kearsipan yang handal	1 Penerapan sistem arsip	1 Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Kerjasama dengan arsip daerah	2 Terkelolanya arsip statis dan dinamis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan KPU Provinsi NTT	3 Terdokumentasinya arsip vital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4 Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis													Belum ada JF Arsiparis di KPU Provinsi NTT
5	Penguatan Sistem manajemen SDM ASN	1 Pembangunan Sistem Merit	1 Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1 Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3 Sasaran Kinerja Pegawai mendukung sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ <i>Cascading</i>			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4 Pengukuran periodik Sasaran kinerja individu						√						√	
				5 Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				6 Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian <i>reward and punishment</i>			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Penerapan <i>assessment</i> untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	1) Data mutasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2) Data Promosi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3) Data Peserta Assessment			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1) Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya;			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2) Jumlah Pelanggaran tahun ini			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3) Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukum			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4 Perencanaan Kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1) Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Provinsi NTT			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6 Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi jabatan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			7 Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2) Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan KPU Provinsi NTT	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	a) Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja	Renstra Satuan kerja dan Renstra hasil reviu													Telah dilaksanakan pada tahun 2021
			b) Reviu Renstra Satuan Kerja														Telah dilaksanakan pada tahun 2021
			c) Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	1 Adanya dokumen penetapan kinerja hingga level Eselon IV		√											
				2 % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward and Punishment</i>												√	
				3 Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (kerangka logis kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai						√						√	
			d) Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1) Adanya program dan kegiatan:			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				a) Jumlah program			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b) Jumlah kegiatan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				c) Jumlah programn yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				d) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2) Persentase sasaran kinerja:			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				a) Jumlah Sasaran Kinerja			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3) Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				a) Jumlah anggaran total			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b) Jumlah anggaran yang berhasil difocusing			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			e) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			f) Pengukuran Capaian Kinerja KPU Provinsi NTT	% capaian kinerja KPU Provinsi NTT			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			g) Evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi NTT	1) Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2) Reviu Lakip KPU Provinsi NTT			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			h) Pelaporan Kinerja KPU Provinsi NTT	Pelaporan kinerja KPU Provinsi NTT tepat waktu												√	
		2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a) Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin	1) Terisinya aplikasi E-Lapkin			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2) Data E-lapkin termutakhirkan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			b) Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas kinerja	1) % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2) Pengelola PPBJ bersertifikat			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			c) Pembangunan jabatan Fungsional yang terkait dengan akuntabilitas kinerja:														
				1) JF Analis Pengelola Keuangan APBN			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2) JF Pengelola Pengadaan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) JF Perencana	3) % Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Penguatan Pengawasan	a) Pembangunan Zona Integritas KPU Provinsi NTT	1) Pencanangan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi NTT	Terbentuknya Zona Integritas				√	√								
			2) Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi NTT	a) Ditandatangani Piagam Integritas oleh para pihak dan saksi				√	√								
				b) Masuknya KPU NTT dalam penilaian WBK/WBBM				√	√								
				c) Adanya rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalkan				√	√								
			3) Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	a) Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembanguna Zona Integritas di lingkungan KPU NTT	a) Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI						√	√	√	√	√	√	√	
				b) % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI						√	√	√	√	√	√	√	
				c) Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan						√	√	√	√	√	√	√	
			5) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	a) Terisinya LKE ZI													
				b) Terisinya PMPRB ZI bagi satuan kerja yang ditunjuk							√					√	
		b) Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi KPU	1) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Telah dibentuk dari Tahun 2021
			2) Pembangunan komitmen dan diseminasi atas peraturan gratifikasi	a) Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b) Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU provinsi NTT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				c) Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi NTT				√									
			3) <i>Public Campaign</i> Anti Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan sitem pengendalian gratifikasi	a) laporan pengendalian gratifikasi b) Tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan			√			√			√			√	



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		c) Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> KPU	1) Pembangunan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> di lingkungan KPU Provinsi NTT	a) Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik												√	Koordinasi dengan Inspektorat KPU
				b) Adanya SOP WBS												√	
				c) Adanya Pengelola WBS												√	
			2) Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Provinsi NTT	Prosentase pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti												√	
			3) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan WBS di lingkungan KPU provinsi NTT	laporan pengelolaan WBS di lingkungan KPU Provinsi NTT												√	
		d) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1) Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi NTT	% Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan					√	√	√	√					
			2) Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Provinsi NTT	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan					√	√	√	√					
			3) Moitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut atas pengelolaan benturan kepentingan						√	√	√	√	√	√	√	√	
		e) Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Provinsi NTT	1) Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Provinsi NTT	Adanya tim SPIP di lingkungan KPU Provinsi NTT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2) Pelaksanaan SPIP: a) Lingkungan Pengendalian b) Penilaian Risiko c) Kegiatan pengendalian d) Informasi dan Komunikasi e) Pemantauan pengendalian intern	Terselenggaranya:	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				a) Lingkungan Pengendalian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b) Penilaian Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				c) Kegiatan pengendalian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				d) Informasi dan Komunikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				e) Pemantauan pengendalian intern	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Tindak lanjut Pengelolaan SPIP	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		f) Penanganan Pengaduan Masyarakat	1) Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Provinsi NTT	a) Tersedianya sarana penyampaian pengaduan												√	
				b) Adanya pejabat yang mengelola pengaduan												√	
				c) Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan												√	
				d) Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan												√	



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Provinsi NTT	Prosentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti												√	
			3) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat												√	
		g) Peningkatan integritas individu	1) Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Provinsi NTT			√										
			2) Penyampaian LHKASN	100% LHKASN di lingkungan KPU Provinsi NTT			√										
		h) Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1) Pembangunan unit kerja pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KPU Provinsi NTT	√												
			2) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai Perpres 16 Tahun 2018	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pengadaan barang/Jasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a) Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Provinsi NTT	1) Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Provinsi NTT baik kepada internal dan eksternal				√								√	
			2) Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen Standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 meliputi:	a) Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan)						√						√	
			a) Dasar hukum							√						√	
			b) Persyaratan layanan							√						√	
			c) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan	b) Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Provinsi NTT						√						√	
			d) Jangka waktu penyelesaian layanan							√						√	
			e) Biaya/tarif	c) Indeks kepuasan layanan yang didapat melalui survei pelayanan jumlah sengketa						√						√	
			f) Produk layanan							√						√	
			g) Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Jumlah sengketa pelayanan menurun						√						√	
			h) Kompetensi pelaksana							√						√	
			i) Pengawasan internal	e) Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik ASN dan Kode Etik Penyelenggara pemilu						√						√	
			j) Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Adanya akses pengaduan masyarakat jumlah pengaduan						√						√	



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			k) Jumlah pelaksana	g) masuk, sedang proses dan selesai)  Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal						√							√
			l) Jaminan pelayanan							√						√	
			m) Jaminan keamanan								√						√
			n) Evaluasi kinerja pelaksana								√						√
			Tools evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2017								√						√
											√						√
											√						√
											√						√
											√						√
			Penilaian Kinerja									√					
	b) Mendorong inovasi di sektor pelayanan kepelumuhan dan administrasi di lingkungan KPU Provinsi NTT	1) Menciptakan/melakukan deregulasi pelayanan/ menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal:  1) Kesesuaian persyaratan  2) Kemudahan Sistem, mekanisme dan prosedur  3) Kecepatan waktu penyelesaian  4) Kejelasan biaya/tarif, gratis/berbayar  5) Kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan  6) Kompetensi pelaksana  7) Perilaku petugas  8) Kualitas sarana dan prasarana  9) Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a) Indeks kepuasan layanan yang didapat melalui survei pelayanan  Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan  Adanya SOP pelayanan  c) Informasi kepada publik terkait biaya layanan  e) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Provinsi NTT baik kepada internal dan eksternal  Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi  f)				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				b) kebijakan pelayanan							√						
				c) Informasi kepada publik terkait biaya layanan							√						
				d) biaya layanan							√						
				e) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Provinsi NTT baik kepada internal dan eksternal							√						
				f) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi							√						
											√						
											√						
											√						
											√						
		2) Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan	a) Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi						√								
b) Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi									√								√
3) Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke KPU Provinsi NTT		a) Adanya sosialisasi inovasi					√	√									√
		b) <i>Benchlearning</i> dari unit/satker lain terkait hasil inovasi					√	√									√
c) Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik		Membangun dan menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik	1) Tersedianya Standar pelayanan sesuai amanat UU				√	√									

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1) Standar pelayanan; a) Persyaratan layanan b) Sistem mekanisme prosedur c) Produk layanan d) Jangka waktu penyelesaian e) Biaya/tarif	2) Tersedianya maklumat Pelayanan				√	√								
								√	√								
				3) Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik				√	√								
								√	√								
								√	√								
			2) Maklumat pelayanan					√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Sistem informasi pelayanan publik	4) Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4) Sarana prasarana dan fasilitas					√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5) Pelayanan khusus kepada; a) Ketersediaan saana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll) b) Ketersediaan pelayan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan												√	
			6) Pengelolaan pengaduan a) Ketersediaan sarana pengaduan b) Ketersediaan informasi prosedur dan taat cara penyampaian aduan c) Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan	6) Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				7) Tersedianya survei dan saran pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				8) Tersedianya visi, misi dan motto pelayanan													
				9) Atribut layanan dapat terlihat publik													
				10) Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Provinsi NTT				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			7) Penilaian kinerja berupa sarabna pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan					√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			8) Visi, Misi dan Motto Pelayanan: a) Ketersediaan visi dan misi pelayanan b) Ketersediaan motto pelayanan					√								√	
								√								√	
			9) Atribut Pelayanan; a) Berupa kartu identitas petugas b) kartu tamu c) Buku tamu d) Petunjuk arah ruang layanan		√											√	
					√											√	
					√											√	
			10) Pelayanan terpadu satu pintu		√											√	
	d) Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik		1) Pembangunan kerja sama					√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu					√	√	√	√	√	√	√	√	√	



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		e) Penerapan <i>reward and punishment</i> penyelenggaraan pelayanan publik	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward and punishment</i> dalam pelayan internal dan eksternal	Adanya pemberian <i>reward and punishment</i> dalam pelayanan						√						√	


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE